



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 450.1 /KPTS/MU/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR DATA PRIORITAS PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu melakukan penetapan penentuan daftar data prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Daftar Data Prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1573);
- 15 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1091);
- 16 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1092);
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 18 Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Daftar Data Prioritas Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : Daftar Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan data yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh Produsen Data pada Tahun 2025 memuat data yang meliputi Data Statistik dan/atau Data Spasial; |
| KETIGA | : Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dihasilkan dan dimutakhirkan oleh masing-masing produsen data dan dirilis sesuai jadwal melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Portal Data yang disediakan Produsen Data atau Portal Data yang disediakan oleh Wali Data; |
| KEEMPAT | : Daftar Data Prioritas yang dihasilkan dan dimutakhirkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Maluku Utara; |
| KELIMA | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah; |

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal

25 September

2025

GUBERNUR MALUKU UTARA



SHERLY TJOANDA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 450.1 /KPTS/MU/2025

TANGGAL: 25 September 2025

TENTANG : DAFTAR DATA PRIORITAS PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2025

No	Nama Data	Satuan	Produsen Data	Jadwal Pemutahiran	Jadwal Rilis
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS	Tahunan	Maret 2026
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/BPS	Tahunan	Maret 2026
3	Angka Literasi/Numerasi	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
6	Indeks Pendidikan	Indeks	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
7	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
8	Persentase Anak Usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
9	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
10	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
11	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
12	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
13	Rerata Nilai Kompetensi Literasi SLB (Asesmen Nasional)	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
14	Rerata Nilai Kompetensi Numerik SLB (Asesmen Nasional)	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
15	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
16	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta tingkat SMA	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
17	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta tingkat SMK	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
18	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta tingkat SLB	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
19	Jumlah Guru pada Satuan Pendidikan SMA	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
20	Jumlah Guru pada Satuan Pendidikan SMK	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
21	Jumlah Guru pada Satuan Pendidikan SLB	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
22	Angka putus sekolah SMA	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
23	Angka putus sekolah SMK	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
24	Angka putus sekolah SLB	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
25	Angka mengulang sekolah SMA	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
26	Angka mengulang sekolah SMK	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
27	Angka mengulang sekolah SLB	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
28	Angka kelulusan sekolah SMA	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
29	Angka kelulusan sekolah SMK	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
30	Angka kelulusan sekolah SLB	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
31	Persentase SMA terakreditasi minimal B	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
32	Persentase SMK terakreditasi minimal B	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
33	Persentase SLB terakreditasi	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
34	Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
35	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
36	Indeks Pemerataan Guru	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
37	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026

38	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
39	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan Diperbarui	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
40	Jumlah Sarana Laboratorium pada Satuan Pendidikan SMA	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
41	Jumlah Sarana Laboratorium pada Satuan Pendidikan SMK	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
42	Jumlah Sarana Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SMA	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
43	Jumlah Sarana Perpustakaan pada Satuan Pendidikan SMK	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
44	Cakupan implementasi pengendalian perizinan pendidikan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
45	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas air minum layak	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
46	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi siswa)	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
47	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
48	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
49	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas listrik	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
50	Jumlah SLB yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
51	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas air minum layak	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
52	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi siswa)	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
53	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
54	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
55	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas listrik	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
56	Jumlah SMA yang memiliki fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
57	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas air minum layak	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
58	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi siswa)	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
59	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
60	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
61	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas listrik	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
62	Jumlah SMK yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
63	Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
64	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
65	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
66	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
67	Cakupan implementasi Pengembangan Kebudayaan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
68	Cakupan implementasi Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
69	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
70	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
71	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
72	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
73	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Maret 2026
74	Indeks Kesehatan	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
75	Angka Kematian Ibu	per 1.000 KH	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
76	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
77	Prevalensi stunting pada balita	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
78	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
79	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
80	Persentase Masvarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
81	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
82	Prevalensi wasting pada balita	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
83	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026

84	Indeks Keluarga Sehat	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
85	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
86	Cakupan kunjungan Antenatal (K4)	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
87	Cakupan kunjungan Neonatal	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
88	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
89	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
90	Persentase Puskesmas menyelenggarakan	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
91	Persentase Desa melaksanakan STBM	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
92	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
93	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
94	Persentase Puskesmas terakreditasi	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
95	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
96	Insidensi TB	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
97	Prevalensi Kusta	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
98	Insidensi HIV	Per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
99	Kabupaten/kota eliminasi malaria	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
100	Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100 ribu penduduk	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
101	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
102	Predikat Akreditasi RSUD Sofifi	Persen	RSUD Sofifi	Tahunan	Maret 2026
103	Rasio daya tampung RSUD Sofifi per satuan penduduk	Persen	RSUD Sofifi	Tahunan	Maret 2026
104	Predikat Akreditasi RSJ Sofifi	Predikat	RSJ Sofifi	Tahunan	Maret 2026
105	Rasio daya tampung RSJ Sofifi per satuan penduduk	Persen	RSJ Sofifi	Tahunan	Maret 2026
106	Predikat Akreditasi RSUD Chasan Boesoeri	Predikat	RSUDChasan Boesoeri	Tahunan	Maret 2026
107	Rasio daya tampung RSUD Chasan Boesoeri per satuan penduduk	Persen	RSUDChasan Boesoeri	Tahunan	Maret 2026
108	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
109	Persentase puskesmas tanpa dokter	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
110	Persentase puskesmas mampu PONED	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
111	Rasio Ketersediaan Dokter RSUD Sofifi per satuan penduduk	Persen	RSUD Sofifi	Tahunan	Maret 2026
112	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
113	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
114	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
115	Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
116	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Persen	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret 2026
117	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
118	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
119	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
120	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
121	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
122	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
123	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
124	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
125	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
126	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
127	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
128	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
129	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
130	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
131	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
132	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026

133	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
134	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
135	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
136	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
137	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
138	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
139	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Jalan	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
140	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
141	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
142	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
143	Cakupan implementasi Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
144	Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
145	Kemantapan Jalan Nasional	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
146	Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
147	Persentase rumah tangga (RT) yang terlayani sanitasi layak	Persen	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
148	Panjang Jaringan Irigasi sesuai kewenangan yang dibangun	Meter	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
149	Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Ha	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
150	Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (Ha)	Ha	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
151	Total Panjang Infrastruktur Pengendali banjir/Pencegah Bencana (Talud/Bronjong) yang Terbangun	Meter	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Tahunan	Maret 2026
152	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
153	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
154	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
155	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
156	Persentase nPermukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana, dan Utilitas	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
157	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
158	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
159	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
160	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
161	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
162	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
163	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
164	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
165	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
166	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
167	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
168	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
169	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
170	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
171	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
172	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026

173	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
174	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
175	Cakupan implementasi Pengembangan Permukiman	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
176	Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
177	Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
178	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang harus ditangani sesuai rencana pada tahun	Unit	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
179	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang sudah ditangani pada tahun berkenaan	Unit	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
180	Jumlah rumah korban relokasi Provinsi yang harus ditangani sesuai rencana pada tahun	Unit	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
181	Jumlah rumah korban bencana Provinsi yang sudah ditangani pada tahun berkenaan	Unit	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
182	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni dan terjangkau	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
183	Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani	Ha	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
184	Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani (persen)	Persen	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	Tahunan	Maret 2026
185	Indeks Rasa Aman	Angka	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
186	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
187	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
188	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
189	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
190	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
191	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
192	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
193	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
194	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
195	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
196	Jumlah Personil Satpol PP Provinsi	Orang	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
197	Jumlah Personil PASN	Orang	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
198	Jumlah Personil Linmas	Orang	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
199	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang Harus ditegakkan oleh Satpol PP	Perda/perkada	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
200	Jumlah Perda/Perkada yang yang memuat sanksi yang telah ditegakkan oleh Satpol PP	Perda/perkada	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
201	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
202	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
203	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Tahunan	Maret 2026
204	Indeks Risiko Bencana Provinsi	Indeks	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
205	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
206	Cakupan implementasi Penanggulangan Bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
207	Jumlah Kejadian Bencana	Kejadian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
208	Jumlah Korban Bencana	Jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
209	Persentase penanganan Pra-Bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
210	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat Bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
211	Persentase pendampingan penanganan Pasca Bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
212	Persentase penyelesaian dokumen keberencanaan provinsi sampai dengan	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2026
213	Cakupan implementasi Pemberdayaan	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
214	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026

215	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
216	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
217	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
218	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
219	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
220	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
221	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
222	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
223	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
224	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
225	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
226	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
227	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
228	Indeks Peranan Sosial	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
229	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
230	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
231	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
232	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
233	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
234	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
235	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
236	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
237	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
238	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
239	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
240	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	Dinas sosial	Tahunan	Maret 2026
241	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial	Persen	Dinas Sosial	Tahunan	Maret 2026
242	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam	Orang	Dinas Sosial	Tahunan	Maret 2026
243	Persentase pemenuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional	Persen	Dinas Sosial	Tahunan	Maret 2026
244	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam Panti	Orang	Dinas Sosial	Tahunan	Maret 2026
245	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam Panti	Orang	Dinas Sosial	Tahunan	Maret 2026
246	Jumlah Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam Panti	Orang	Dinas Sosial	Tahunan	Maret 2026
247	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / BPS	Tahunan	Maret 2026
248	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
249	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
250	Rasio Kewirausahaan	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
251	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
252	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026

253	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
254	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
255	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
256	Produktifitas per tenaga kerja	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
257	Tingkat kesempatan kerja layak	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
258	Cakupan implementasi Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
259	Cakupan implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
260	Cakupan implementasi Penempatan Tenaga Kerja	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
261	Cakupan implementasi Hubungan Industrial	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
262	Cakupan implementasi Pengawasan Ketenaga kerjaan	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
263	Jumlah kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
264	Jumlah Tenaga Kerja Asing	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
265	Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi dan pemagangan dalam negeri	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
266	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
267	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial yang diselesaikan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
268	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
269	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
270	Jumlah perusahaan dalam Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP-Online) yang diawasi oleh Disnaker	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
271	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Rp/Kapita/Tahun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
272	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
273	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
274	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
275	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
276	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
277	Cakupan implementasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
278	Cakupan implementasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
279	Cakupan implementasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	Maret 2026
280	Indeks Pembangunan Gender	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
281	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
282	Indeks Perlindungan Anak	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
283	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
284	Indeks Keluarga Sehat	Angka	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
285	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
286	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026

287	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
288	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
289	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
290	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
291	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
292	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
293	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
294	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
295	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
296	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
297	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
298	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
299	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
300	Indeks Pembangunan Keluarga	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
301	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
302	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
303	Jumlah Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
304	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
305	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
306	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan	Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
307	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
308	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan	Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026

309	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
310	Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahunan	Maret 2026
311	Indeks Ketahanan Pangan	Angka/indeks	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
312	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
313	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
314	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
315	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
316	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
317	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
318	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan	Kecamatan	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
319	Persentase kecamatan bebas kerawanan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
320	Konsumsi energi perkapita	kcal/perkapita	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
321	Konsumsi protein perkapita	gram/perkapita	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
322	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
323	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
324	Cakupan implementasi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
325	Cakupan implementasi Penanganan Kerawanan Pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
326	Cakupan implementasi Pengawasan Keamanan Pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
327	Jumlah Kabupaten/Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan	Kab/Kota	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
328	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
329	Jumlah cadangan beras	ton	Dinas Pangan	Tahunan	Maret 2026
330	Indeks Kualitas Udara	Indeks	Dinas lingkungan	Tahunan	Maret 2026
331	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	Dinas lingkungan	Tahunan	Maret 2026
332	Cakupan implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	Dinas lingkungan hidup	Tahunan	Maret 2026
333	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	Dinas lingkungan hidup	Tahunan	Maret 2026
334	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	Dinas lingkungan hidup	Tahunan	Maret 2026
335	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
336	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
337	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
338	Indeks Kualitas Air	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
339	Persentase RTH	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
340	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
341	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
342	Persentase MHA yang Ditingkatkan	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
343	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
344	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
345	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
346	Cakupan implementasi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
347	Cakupan implementasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
348	Cakupan implementasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
349	cakupan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
350	Cakupan implementasi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
351	Cakupan implementasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
352	Cakupan implementasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
353	Cakupan implementasi Pengelolaan	Persen	Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Maret 2026
354	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	Disdukcapil / BPS	Tahunan	Maret 2026
355	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	Disdukcapil / BPS	Tahunan	Maret 2026
356	Rasio Penduduk	Persen	Disdukcapil / BPS	Tahunan	Maret 2026

357	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
358	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
359	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
360	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
361	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
362	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
363	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
364	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
365	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
366	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
367	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
368	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
369	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	Disdukcapil	Tahunan	Maret 2026
370	Indeks Desa	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
371	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
372	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
373	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
374	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
375	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
376	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
377	Persentase desa berstatus mandiri	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
378	Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
379	Persentase desa berstatus mandiri	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
380	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Berdasarkan Kategori Jenis Usaha	BUMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
381	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum	BUMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
382	Jumlah Desa per Provinsi yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
383	Jumlah Desa per Provinsi yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
384	Jumlah pendamping desa yang diberdayakan	Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahunan	Maret 2026
385	Konektivitas Darat	Persen	Dinas Perhubungan	Tahunan	Maret 2026
386	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	Dinas Perhubungan	Tahunan	Maret 2026
387	Konektivitas Laut	Persen	Dinas Perhubungan	Tahunan	Maret 2026
388	Persentase Pengendalian KKOP	Persen	Dinas Perhubungan	Tahunan	Maret 2026
389	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persen	Dinas Perhubungan	Tahunan	Maret 2026
390	Rasio konektivitas provinsi	Persen	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
391	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Lalu Lintas	Persen	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
392	Cakupan implementasi Pengelolaan Pelayaran	Persen	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
393	Cakupan implementasi Pengelolaan	Persen	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
394	Jumlah Penumpang Angkutan Umum sesuai data dari seluruh terminal angkutan	orang	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
395	Jumlah Penumpang Kapal Laut/Pel. Penyeberangan sesuai data dari seluruh	orang	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
396	Jumlah Penumpang Pesawat Udara sesuai data dari seluruh bandara	orang	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
397	Jumlah Terminal Angkutan Umum	Terminal	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
398	Jumlah Pelabuhan/Dermaga	Pelabuhan	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
399	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
400	Jumlah Bandar Udara	Bandara	Dinas perhubungan		Maret 2026
401	Jumlah keberangkatan kapal/moda transportasi laut di seluruh pelabuhan selama setahun	Keberangkatan	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
402	Jumlah kasus kecelakaan pelayaran selama setahun	Kasus	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
403	Jumlah Rute Trayek Angkutan Umum lintas kab/kota yang dibutuhkan (sesuai master plan, atau perkiraan rencana	Rute	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026

404	Jumlah Rute Trayek Angkutan Umum lintas kab/kota yang sudah dilayahi	Rute	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
405	Jumlah Rute Penyeberangan Ferry yang dibutuhkan (sesuai master plan, atau perkiraan rencana lainnya)	Rute	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
406	Jumlah Rute Trayek Penyeberangan Ferry yang sudah dilayani	Rute	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
407	Jumlah pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan	Pelabuhan	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
408	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan	Pelabuhan	Dinas perhubungan	Tahunan	Maret 2026
409	Indeks Literasi Digital	Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
410	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
411	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah(survei)	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
412	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
413	Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
414	Aplikasi Informatika	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
415	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
416	Persentase penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
417	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	PD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
418	Jumlah layanan publik Government to Business (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistempenghubung layanan	Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
419	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	PD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
420	literasi Digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
421	Jumlah Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	PD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
422	Jumlah jenis data/informasi publik sesuai amanat UU 14/2008 yang telah disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo	Jenis	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
423	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
424	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
425	Persentase Perangkat Daerah yang menggu nakandata statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
426	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
427	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Maret 2026
428	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
429	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
430	Persentase Koperasi Aktif	Persen	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
431	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
432	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
433	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
434	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
435	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor	Persen	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
436	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
437	Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif	Persen	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
438	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil	Persen	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
439	Cakupan implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
440	Cakupan implementasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
441	Cakupan implementasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
442	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
443	Cakupan implementasi Pengembangan UMKM	Persen	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
444	Jumlah Usaha Kecil yang diinput kedalam sistem Online Data System (ODS)	UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
445	Jumlah Usaha Kecil yang memperoleh fasilitasi pendidikan dan pelatihan atau pemberdayaan setiap tahunnya	UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026

446	Jumlah Koperasi	Unit	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
447	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
448	Jumlah Modal Usaha	Rp Milyar	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
449	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
450	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
451	Jumlah Koperasi yang diawasi setiap tahunnya	Unit	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
452	Jumlah Koperasi yang memperoleh fasilitasi pendidikan dan pelatihan atau pemberdayaan setiap tahunnya	Unit	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
453	Jumlah Usaha Mikro	Unit	Dinas Koperasi dan UKM	Tahunan	Maret 2026
454	Jumlah Usaha Kecil	Unit	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
455	Jumlah Usaha Menengah	Unit	Dinas Koperasi dan	Tahunan	Maret 2026
456	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Milyar Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP/BPS	Tahunan	Maret 2026
457	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Milyar Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
458	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
459	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
460	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
461	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
462	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
463	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
464	Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
465	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
466	Cakupan implementasi Promosi Penanaman Modal	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
467	Cakupan implementasi Pelayanan Penanaman Modal	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
468	Cakupan implementasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
469	Cakupan implementasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
470	Rata-Rata Lama Proses Perizinan	Hari	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tahunan	Maret 2026
471	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
472	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
473	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
474	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
475	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
476	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
477	Indeks Pembangunan Olahraga	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
478	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga tingkat nasional (PON/Kejurnas)	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	4 Tahunan	Maret 2026
479	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga pelajar tingkat nasional	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
480	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
481	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
482	Perolehan medali pada kompetisi olahraga multi event pelajar tingkat nasional (POPNAS)	Medali	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
483	Perolehan medali dalam kompetisi olahraga multi event tingkat nasional (PON)	Medali	Dinas Pemuda dan Olahraga	4 Tahunan	Maret 2026
484	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah (Kwarda)	Persen	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tahunan	Maret 2026
485	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
486	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai/Kategori	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
487	Cakupan implementasi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
488	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026

489	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	Persen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
490	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	orang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
491	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
492	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
493	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
494	Nilai akreditasi pengelolaan arsip daerah	Poin	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
495	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
496	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
497	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Persen	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
498	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya)	PD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
499	Jumlah asrsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang diapresiasi (kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya)	eksemplar	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tahunan	Maret 2026
500	Pertumbuhan PDRB Perikanan	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
501	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
502	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
503	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
504	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
505	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
506	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
507	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
508	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
509	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
510	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
511	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
512	Volume Produk Olahan Perikanan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
513	Nilai Ekspor Perikanan	USD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
514	Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
515	Proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis aman (persen)	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
516	Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
517	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen)	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
518	Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	Persen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
519	Operasi kapal pengawas/speed	Hari/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahunan	Maret 2026
520	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
521	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
522	Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
523	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
524	Cakupan implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
525	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
526	Pertumbuhan PDRB Pariwisata	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
527	Kontribusi PDRB Pariwisata	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
528	Rerata lama tinggal wisatawan asing	Hari	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
529	Rerata lama tinggal wisatawan domestik	Hari	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
530	Kunjungan wisatawan asing	Orang	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
531	Kunjungan wisatawan domestik	Orang	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
532	Persentase Kunjungan wisatawan ke Museum	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
533	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
534	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026

535	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
536	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
537	Jumlah Pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang memperoleh fasilitasi pemberdayaan (kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya)	Orang	Dinas Pariwisata	Tahunan	Maret 2026
538	Cakupan implementasi Penyuluhan	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
539	Pertumbuhan PDRB Pertanian	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
540	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
541	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
542	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
543	Produksi Peternakan	Ton	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
544	Produktifitas tanaman pangan	Ton/Ha	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
545	Produktifitas tanaman hortikultura	Ton/Ha	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
546	Produktifitas tanaman perkebunan	Ton/Ha	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
547	Populasi ternak	Ekor	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
548	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
549	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
550	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
551	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
552	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
553	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
554	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
555	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
556	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
557	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
558	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	Dinas Pertanian	Tahunan	Maret 2026
559	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
560	Indeks Keanekaragaman Hayati	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
561	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
562	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
563	Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	m3	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
564	Jumlah titik api terdeteksi	Titik	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
565	Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
566	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
567	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
568	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
569	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
570	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
571	Luas lahan kritis seluruhnya (Ha)	Ha	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
572	Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
573	Luas hutan dalam kawasan hutan seluruhnya	Ha	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
574	Luas hutan dalam kawasan hutan yang rusak	Ha	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
575	Luas hutan di luar kawasan hutan seluruhnya	Ha	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
576	Luas hutan di luar kawasan hutan yang rusak	Ha	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
577	Volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	M3	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
578	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang	Kawasan	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
579	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Berkelas Madya	Kelompok	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
580	Luas Rehabilitasi DAS (Ha)	Ha	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
581	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan	Persen	Dinas kehutanan	Tahunan	Maret 2026
582	Rasio Elektrifikasi	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
583	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
584	Konsumsi Listrik Perkapita	Kwh/Kapita	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
585	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
586	Cakupan implementasi Pengelolaan Energi Terbarukan	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026

587	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	RT	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
588	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
589	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	juta m3/Tahun	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
590	Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	km2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
591	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah	Ha	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
592	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Rekomendasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
593	Cakupan implementasi Pengelolaan Aspek Gegeologian	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
594	Jumlah usaha tambang yang harus diawasi	Perusahaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
595	Jumlah usaha tambang yang harus diawasi tidak melanggar ketentuan perundang-	Perusahaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
596	Jumlah desa sudah teraliri listrik	Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
597	Rasio elektrifikasi provinsi (persen)	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
598	Kapasitas terpasang pembangkit listrik seluruhnya (MW)	MW	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Tahunan	Maret 2026
599	Kapasitas terpasang pembangkit listrik bersumber EBT (MW)	MW	Dinas Energi dan Sumber	Tahunan	Maret 2026
600	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
601	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
602	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
603	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
604	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
605	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
606	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
607	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
608	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
609	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
610	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
611	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
612	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
613	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
614	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
615	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
616	Nilai ekspor non migas	Rp	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
617	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
618	Nilai Ekspor Barang	Juta USD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
619	Jumlah pengaduan konsumen yang diterima	Aduan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
620	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan oleh Dinas dan BPSK sesuai ketentuan perundang-undangan	Aduan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
621	Jumlah sampel komoditi potensial yang dilakukan pengujian	Sampel	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
622	Jumlah sampel komoditi potensial yang sesuai ketentuan yang berlaku	Sampel	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
623	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
624	Jumlah pelaku usaha MB TBB	orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
625	Jumlah pelaku usaha MB TBB yang memiliki SIUP	orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
626	Jumlah barang beredar yang diawasi	Buah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
627	Jumlah barang beredar yang diawasi yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Buah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
628	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
629	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026

630	Jumlah Perusahaan Industri Besar	Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
631	Jumlah tenaga kerja di perusahaan industri besar	orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
632	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
633	Jumlah izin usaha industri besar yang diterbitkan	Izin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
634	Jumlah izin usaha industri besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil	Izin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
635	Jumlah industri besar yang terdaftar dalam basis data SIINAS	Izin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Maret 2026
636	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	Persen	Biro Organisasi	Tahunan	Maret 2026
637	Cakupan implementasi Penataan Organisasi	Persen	Biro Organisasi	Tahunan	Maret 2026
638	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	Biro Organisasi	Tahunan	Maret 2026
639	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
640	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
641	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Indeks/Kategori	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
642	Cakupan implementasi Kesejahteraan	Persen	Biro Kesra	Tahunan	Maret 2026
643	Indeks Reformasi Hukum	Angka	Biro Hukum	Tahunan	Maret 2026
644	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persen	Biro Hukum	Tahunan	Maret 2026
645	Persentase Penegakan Perda	Persen	Biro Hukum	Tahunan	Maret 2026
646	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	Biro Hukum	Tahunan	Maret 2026
647	Cakupan implementasi Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persen	Biro Hukum	Tahunan	Maret 2026
648	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan	Persen	Biro Perekonomian	Tahunan	Maret 2026
649	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	Biro Perekonomian	Tahunan	Maret 2026
650	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	Persen	Biro PBJ	Tahunan	Maret 2026
651	Cakupan implementasi Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	Biro PBJ	Tahunan	Maret 2026
652	Efektivitas Kebijakan Administrasi	Persen/Kategori	Biro Adbang	Tahunan	Maret 2026
653	Cakupan implementasi Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	Biro Adbang	Tahunan	Maret 2026
654	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda (huruf)	Huruf	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
655	Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda (Angka)	Nilai	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
656	Total jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemda Provinsi Maluku Utara	PD	Biro Organisasi	Tahunan	Maret 2026
657	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara tepat substansi dan waktu	PD	Biro Organisasi	Tahunan	Maret 2026
658	Skor EKPPD (berdasarkan SK Mendagri)	Nilai	Biro Organisasi	Tahunan	Maret 2026
659	Jumlah Kerjasama daerah (berdasarkan jumlah MoU), kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya	Kerjasama	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
660	Jumlah Kerjasama daerah (berdasarkan jumlah MoU) yang sudah ditindaklanjuti	Kerjasama	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
661	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	Biro PBJ	Tahunan	Maret 2026
662	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa selama setahun dalam tahun berkenaan	Paket	Biro PBJ	Tahunan	Maret 2026
663	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	Paket	Biro PBJ	Tahunan	Maret 2026
664	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	Biro Kesra	Tahunan	Maret 2026
665	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	Biro Kesra	Tahunan	Maret 2026
666	Jumlah lembaga keagamaan/ organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Lembaga	Biro Kesra	Tahunan	Maret 2026
667	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah (berdasarkan hasil survey, jika ada)	Indeks	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
668	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Biro Pemerintahan	Tahunan	Maret 2026
669	Jumlah unit sarana / prasarana gedung kantor	Unit	Biro Umum	Tahunan	Maret 2026
670	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda	paket	Biro Umum	Tahunan	Maret 2026
671	Tingkat kepuasan anggota dewan terhadap layanan sekretariat DPRD	Persen	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
672	Persentase Penetapan Ranperda	Persen	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
673	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
674	Jumlah Ranperda dalam Prolegda	Dokumen	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
675	Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	Dokumen	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
676	Jumlah Item Pokok-pokok Pikiran DPRD yang diusulkan dalam RKPD tahun berkenaan yang disusun	Usulan	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026

677	Jumlah Item Pokok-pokok Pikiran DPRD yang diusulkan dalam RKPD tahun berkenaan yang disusun pada tahun sebelumnya dan telah ditindaklanjuti dalam	Usulan	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
678	Jumlah Item Catatan DPRD dalam LKPJ Gubernur yang disampaikan pada tahun	Catatan	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
679	Jumlah Item Catatan DPRD dalam LKPJ Gubernur yang disampaikan pada tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti sesuai LKPJ Gubernur yang disampaikan pada tahun	Catatan	Sekretariat DPRD	Tahunan	Maret 2026
680	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
681	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
682	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
683	Tingkat realisasi kinerja program pembangunan daerah	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
684	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
685	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
686	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang SDA	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
687	Rata-rata Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
688	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
689	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
690	Rata-rata Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan	Dokumen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
691	Rata-rata Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
692	Rata-rata Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Usulan	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
693	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
694	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
695	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) – Opini BPK	Nilai	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
696	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
697	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
698	Persentase Penurunan SIIPA	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
699	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
700	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
701	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
702	Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
703	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
704	Persentase efektifitas belanja daerah (realisasi terhadap target)	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
705	Jumlah kabupaten/kota dengan besaran defisit APBD masih dalam batas ketentuan	Kab/kota	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
706	Jumlah BMD (Barang Milik Daerah) Hasil Pendataan (kumulatif dari tahun-tahun	BMD	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
707	Jumlah BMD (Barang Milik Daerah) Hasil Pendataan yang telah dilakukan Pencatatan dan Pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan (kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya)	BMD	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
708	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
709	Jumlah OPD/UPTD yang tertib dalam pengelolaan aset daerah	PD	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
710	Nilai aset tetap Pemerintah Daerah sesuai Audited Neraca (Rp)	Rp	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
711	Skor konsistensi penganggaran KUA APBD (sesuai Permendagri 19/2020)	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
712	Skor efektifitas penyerapan anggaran (sesuai Permendagri 19/2020)	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
713	Skor Predikat Opini BPK Atas LKPD (sesuai Permendagri 19/2020)	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
714	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Persen	BPKPAD	Tahunan	Maret 2026
715	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
716	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026
717	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah	Persen	Bappeda	Tahunan	Maret 2026

718	Rasio efektivitas pajak daerah (persen)	Persen	Bappenda	Tahunan	Maret 2026
719	Rasio efektivitas pengelolaan retribusi daerah	Persen	Bappenda	Tahunan	Maret 2026
720	Indeks Profesionalitas ASN	Persen/Kategori	BKD	Tahunan	Maret 2026
721	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	BKD	Tahunan	Maret 2026
722	Jumlah ASN	Orang	BKD	Tahunan	Maret 2026
723	Jumlah pelanggaran disiplin (jumlah kasus)	Nilai	BKD	Tahunan	Maret 2026
724	Jumlah pelanggaran disiplin (jumlah ASN yang melanggar)	Orang	BKD	Tahunan	Maret 2026
725	Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia	Jabatan	BKD	Tahunan	Maret 2026
726	Jumlah jabatan eseloneering yang terisi	Jabatan	BKD	Tahunan	Maret 2026
727	Jumlah pegawai ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi	Orang	BKD	Tahunan	Maret 2026
728	Jumlah pegawai ASN fungsional guru dan tenaga kesehatan	Orang	BKD	Tahunan	Maret 2026
729	Jumlah pegawai ASN fungsional bukan guru dan tenaga kesehatan	Orang	BKD	Tahunan	Maret 2026
730	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	BKD	Tahunan	Maret 2026
731	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	BKD	Tahunan	Maret 2026
732	Persentase ASN yang Ditingkatkan	Persen	BKD	Tahunan	Maret 2026
733	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi	Indeks/Kategori	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
734	Jumlah Pejabat ASN (pada tahun berkenaan)	Orang	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
735	Jumlah Pejabat ASN pada tahun berkenaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
736	Jumlah pegawai fungsional di luar guru dan tenaga kesehatan yang telah mengikuti diklat	Orang	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
737	Jumlah pegawai fungsional di luar guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat	Orang	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
738	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	Persen	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
739	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
740	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial, dan Fungsional	Persen	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
741	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
742	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
743	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	BPSDM	Tahunan	Maret 2026
744	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
745	Indeks Inovasi Daerah	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
746	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
747	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
748	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
749	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
750	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
751	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
752	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
753	Persentase Fasilitasi, Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
754	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
755	Cakupan implementasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
756	Jumlah Produk/Dokumen Penelitian dan pengembangan Daerah yang dihasilkan pada tahun berkenaan	Dokumen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
757	Jumlah Produk/Dokumen Penelitian dan pengembangan pada tahun berkenaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah (Perda/Pergub/SK Kepala SKPD/dll)	Dokumen	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
758	Jumlah Inovasi Daerah yang telah diinput dalam Portal Inovasi Daerah Kemendagri	Inovasi	Balitbangda	Tahunan	Maret 2026
759	Indeks Integritas Nasional	Angka	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
760	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kategori	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
761	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Rekomendasi	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
762	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kategori	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
763	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	Kasus	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026

764	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	Kasus	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
765	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Kasus	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
766	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang	Kasus	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
767	Level Maturitas SPIP Pemda (berdasarkan hasil QA BPKP)	Nilai	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
768	Skor Level Maturitas SPIP Pemda (berdasarkan hasil QA BPKP)	Nilai	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
769	Jumlah perangkat daerah yang memperoleh maturitas SPIP minimal Level 3	PD	Inspektorat	Tahunan	Maret 2026
770	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan tingkat provinsi yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Parpol	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
771	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan	Organisasi	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
772	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu/Pilkada (persen)	persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
773	Jumlah Konflik skala provinsi pada tahun berkenaan (jika ada)	Kasus	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
774	Jumlah Konflik skala provinsi pada tahun berkenaan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kasus	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
775	Indeks Kebebasan Sipil	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
776	Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
777	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
778	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
779	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
780	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
781	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
782	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
783	Persentase konflik skala provinsi yang	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026
784	Cakupan implementasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persen	Kesbangpol	Tahunan	Maret 2026

 **GUBERNUR MALUKU UTARA**
SHERLY TJOANDA